



Judul : DPR Kecam Upaya Aneksasi Tepi Barat
Tanggal : Rabu, 01 Juli 2020
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 14

DPR Kecam Upaya Aneksasi Tepi Barat

KOMISI I DPR RI menentang rencana pemerintah Israel untuk menduduki dan memperluas permukiman bagi warga Israel di wilayah pendudukan Palestina.

“Komisi I DPR RI mengambil sikap tegas menentang upaya aneksasi Tepi Barat dan menolak upaya yang merupakan legalisasi penjajahan Israel atas Palestina ini,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Kharis mengatakan Komisi I DPR RI memandang aneksasi Israel atas Tepi Barat dan Lem-

bah Yordania ialah cita-cita penjajah Israel untuk menyita seluruh tanah Palestina dan memusnahkan bangsa Palestina. Dengan penguasaan wilayah Tepi Barat, proses kolonisasi Israel akan semakin mendapat legalitas dan kekuatan, terutama di wilayah Al Quds (Jerusalem) yang kini diklaim sebagai ibu kota Israel.

Okupasi militer Israel atas wilayah tersebut juga akan mempersulit penyelesaian konflik Palestina-Israel dan memperuncing instabilitas kawasan serta berdampak pada situasi global.

“Tindakan Israel tersebut

bertentangan dengan hukum, parameter, prinsip, dan kesepakatan internasional terutama dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,” ujar Kharis.

Kharis mengatakan Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri agar mengoptimalkan diplomasi secara bilateral dan multilateral untuk menggalang sikap penolakan bersama masyarakat dunia terhadap upaya perampasan wilayah Tepi Barat. Itu termasuk bertujuan menyuarakan perjuangan Palestina untuk kebebasan, kemanusiaan, keadilan, dan hak kembali ke tanah air mereka.

“Komisi I DPR RI juga mendesak PBB serta organisasi dan komunitas internasional untuk mengintervensi situasi krisis di Palestina dengan mengutamakan tindakan kemanusiaan untuk perlindungan warga sipil Palestina yang menjadi korban memburuknya situasi kemanusiaan,” tutur Kharis.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan sikap resmi Komisi I tersebut akan disampaikan kepada pemerintah melalui surat pada Kemenlu RI serta duta besar negara-negara sahabat agar itu diketahui bersama. (Pro/X-11)